

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara, dan antar daerah dalam suatu negara, terutama daerah yang padat penduduknya dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Termasuk di Indonesia, dimana kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suparlan dalam Pratama Yoghi (2014) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan

berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi dimana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap risiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah.

Sifat kompleks masalah kemiskinan menuntut kebijakan dan strategi penanggulangan yang terintegrasi, misalnya melalui program-program perluasan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan manusia dan kemudahan untuk mengakses berbagai peluang sosial ekonomi yang ada. Karena berbagai keterbatasan pemerintah, program pengentasan kemiskinan ataupun kebijakan yang berorientasi pada masalah kemiskinan membutuhkan skala prioritas. Kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan telah didefinisikan berbeda-beda dan merefleksikan suatu spektrum orientasi ideologi. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Jennings dalam Pratama Yoghi 2014).

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Pantjar dikutip dalam Saputra Whisnu (2011) Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan

akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Strategy”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam 3 pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis

ekonomi, dan konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Situs web Kompasiana yang berisi tulisan Dian Aulia Salsabila (2022) memuat informasi yang berkaitan dengan jumlah penduduk miskin. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Kabupaten Jember, Arif Joko Sutejo mengatakan bahwa angka kemiskinan semakin meningkat sejak tahun 2019. Menurutnya kemiskinan terjadi akibat tingginya angka pengangguran. Selain itu, terjadi inflasi sekitar bulan Maret dan bulan April, di saat momen Hari Raya Idul Fitri. Angka kemiskinan sendiri menyentuh angka 10,41 persen di tahun 2021. Hal ini naik 3,67 persen dari tahun sebelumnya pada Maret 2021. Pada bulan Maret 2020, tercatat ada 247.990 jiwa yang dikategorikan penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan atau kategori miskin dengan presentase 6,74 persen. Sementara itu, kategori miskin pada Maret 2021, tercatat 257.090 jiwa dimana Kabupaten Jember peringkat ke dua jumlah

penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang dengan jumlah 276.580 jiwa.

Kepala BPS Kabupaten Jember, Arif Joko Sutejo mengatakan bahwa pada bulan Maret 2021 garis kemiskinan di Kabupaten Jember sebesar Rp. 380.397 per kapita per bulan. Akan tetapi besaran tersebut bertambah sebesar Rp. 15.102 per kapita per bulan. Sebelumnya dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar Rp. 365.295 naik sebesar 4,13 persen. Arif Joko Sutejo, Kepala BPS Kabupaten Jember, menuturkan terkait naiknya jumlah penduduk miskin bahwa akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan ruang mobilitas menjadi terbatas. Selain itu, berdasarkan keterangannya yang paling penting adalah bantuan sosial yang tepat sasaran. Beliau juga mengatakan, “Mudah-mudahan pada tahun 2022 angka kemiskinan mulai menurun karena aktivitas ekonomi yang sudah mulai kembali normal.” Akan tetapi masalah kemiskinan ini tidak hanya bantuan sosial yang paling penting tapi juga pemberdayaan pada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Meskipun pandemi Covid-19 telah menurun, masyarakat mulai dihadapi tantangan baru dengan naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Artinya butuh program jangka panjang dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, tidak hanya program bantuan sosial.

Berdasarkan data time series (2015), daerah yang memiliki kemiskinan tertinggi di Kabupaten Jember berada di 9 kecamatan dari total 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Daerah tersebut, antara lain : Kecamatan Silo sebanyak 14.105 RTM (Raoat Tinjauan Manajemen), Kecamatan Sumberbaru sebanyak 13.516 RTM, Kecamatan Bangsalsari sebanyak 13.197, Kecamatan Ledokombo sebanyak 13.035 RTM, Kecamatan Kalisat sebanyak 12.247 RTM, Kecamatan

Sumberjambe 11.945 RTM, Kecamatan Mumbulsari sebanyak 11.550 RTM, Kecamatan Sukowono sebanyak 11.309 RTM, dan Kecamatan Tempurejo sebanyak 9.470 RTM. Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi rata-rata jauh dari pusat Kabupaten Jember yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari. Hal ini menjadi faktor meningkatnya angka kemiskinan. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan pendekatan sebagai kemiskinan struktural.

Kemiskinan sendiri merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan esensial atau asasi manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketimpangan pembangunan. Tingginya tingkat kemiskinan pada daerah kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten adalah contoh adanya kemiskinan struktural. Hal tersebut terjadi akibat masalah pembangunan yang bersifat struktural, yaitu kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga memicu ketimpangan. Ketimpangan-ketimpangan tersebut meliputi hubungan dengan daerah, hubungan antar daerah tertentu dengan daerah yang lain, hubungan antar sektor modern dengan sektor tradisional, serta hubungan antar sektor asing, sektor domestik, dan sektor nasional.

Tidak hanya sektor pertanian yang dapat dijadikan keunggulan dalam pembangunan wilayah. Tempat wisata juga dapat dijadikan sektor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Daerah pesisir, yaitu pantai bisa dikembangkan melalui penataan tempat yang baik. Dalam penataannya mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan wisatawan. Dari lahan parkir, ruang khusus ibadah dan kamar mandi, maupun ruang publik, yaitu restoran dan

tempat berteduh. Tempat wisata ini dapat dijadikan aktivitas ekonomi, jika dikelola dengan baik dan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar.

Dalam pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan perlu distribusi yang memadai dengan mengedepankan kepentingan bersama. Agar satu wilayah dengan wilayah lainnya terhubung, hal tersebut sangat memerlukan fasilitas jalan yang memadai. Maka perlu diperhatikan bagaimana jalur transportasi yang baik. Memperbaiki kondisi jalan juga sangat perlu untuk mendukung dalam kegiatan distribusi. Hal ini semakin baik lagi jika ada alternatif jalan baru atau jalan yang lebih dekat.

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah perlu secara bertahap menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan. Seperti sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Disamping hal itu semua, SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor utama untuk menggerakkan segala upaya dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, dibutuhkan pemberdayaan bagi SDM (Sumber Daya Manusia). Hal tersebut, berbasis pemberdayaan masyarakat dengan program perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja, berbasis program pendukung lainnya, seperti literasi keuangan maupun pengenalan teknologi dan informasi, serta berbasis pemberdayaan usaha ekonomi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jember untuk mengatasinya perlu kebijakan jangka panjang dari pemerintah. Hal tersebut melalui pembangunan

ekonomi dengan mengembangkan spesialisasi komoditas unggulan pada setiap wilayah. Adanya komoditas unggulan membantu peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi angka kemiskinan. Hal ini perlu didukung oleh distribusi dan infrastruktur yang baik karena dua hal tersebut yang dapat menghubungkan antar satu wilayah ke wilayah lainnya untuk mencapai keseimbangan dan mencegah ketimpangan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas

kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004). Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003:50) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang terorganisir, dimana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan dengan berpedoman pada literatur serta beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menganalisis tingkat kemiskinan yang dihadapkan dengan jumlah PDRB, belanja daerah, serta pendidikan Kabupaten Jember. Penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB Kabupaten Jember berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember?
2. Apakah belanja daerah Kabupaten Jember berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember?
3. Apakah pendidikan Kabupaten Jember berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Kabupaten Jember terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah Kabupaten Jember terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan Kabupaten Jember terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Dapat menjadi masukan bagi para peneliti selanjutnya dan juga sebagai sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya dan juga sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat meneliti di masalah yang sama.
3. Dapat memberikan sumbangan materi bagi para mahasiswa ekonomi khususnya pada bidang Ekonomi Pembangunan.
4. Sebagai pembelajaran dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai PDRB, belanja daerah, pendidikan serta tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember.